

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPhOP PASAL
25/29 (KASUS KPP PRATAMA CANDISARI
SEMARANG PERIODE 2011-2015)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DENNY PRATAMA

NIM. 12020111130066

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Denny Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130066
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan PPhOP Pasal 25/29 (Kasus KPP
Pratama Candisari Periode 2011-2015)
Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc.

Semarang, 17 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

(Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc.)

NIP. 19551208 19803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Denny Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130066

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPhOP Pasal 25/29 (Kasus KPP Pratama Candisari Periode 2011-2015)*

Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Juli 2016

Tim Penguji :

1. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. (.....)
2. Evi Yulia Purwanti, SE.,M.Si. (.....)
3. Dr. Nugroho SBM.,MSP (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Denny Pratama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPhOP Pasal 25/29 (KASUS KPP PRATAMA CANDISARI PERIODE 2011-2015)**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri itu. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Juni 2016

Yang membuat pernyataan

Denny Pratama

NIM 12020111130066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

After every Hardship comes Ease

Quran (65:7)

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih,
Adikku tercinta dan terkasih

ABSTRACT

Individual income tax article 25/29 is part of individual income tax which composes significant contribution on Indonesian tax revenue. During 5 years. It accounts for 22,02% of tax revenue and had collected up to 89,57 billion rupiah. Despite considered as high in sharing, this number is small in retention due the indiscipline tax compliance. Only 6852 effective businessmen tax payers are registered in KPP Pratama Candisari Semarang 2011-2015.

The aim of this research is to analyze several factors on PPhOP Article 25/29's revenue. The economic variable comprises of inflation, growth, number of tax payers registered (JWP), and tax payment slips (SSP) being reported.

Our study employed multiple linear regression using secondary data accounted for 60 observations the result showed that economic growth variable has positive and significant effect to PPhOP Article 25/29, JWP variable influence positive and significant effect to PPhOP Article 25/29 revenue, and same as JWP, SSP variable influence positive and significant to PPhOP article 25/29 revenue, while inflation variable doesn't have a significant effect on PPhOP Article 25/29 Revenue. R^2 -value = 0,9492 means that the model can be explained 94,92 by the independent variables and the rest 5,08 percent explained by the other that doesn't included in the model.

Keywords : Economic Growth, Inflation, Individual Income Tax Revenue, Ordinary least squares (OLS), Tax Compliance, Tax Factors.

ABSTRAK

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 (PPhOP 25/29) merupakan salah satu komponen penerimaan pajak penghasilan nonmigas, PPh nonmigas memiliki kontribusi yang besar pada sistem penerimaan negara di Indonesia, Pada 5 tahun terakhir rata-rata penerimaan PPhOP dalam Penerimaan PPh-nonmigas mencapai 89,57 Milyar (22,02%). Penerimaan PPhOP tersebut tergolong masih kecil, hal ini diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pendapatan dan membayar pajak masih tergolong rendah, bahkan masyarakat wajib pajak juga belum melaporkan pendapatannya. Pada tahun 2011-2015 hanya terdaftar 6.852 WPOP usahawan efektif pada KPP Pratama Candisari Semarang. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis beberapa faktor penerimaan PPhOP Pasal 25/29.

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak (JWP), dan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang dilaporkan terhadap penerimaan PPhOP pasal 25/29 selama periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda atau *Ordinary Least Squares* (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder sebanyak 60 observasi.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29, JWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPhOP pasal 25/29, dan variabel SSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29. Nilai R^2 model adalah sebesar 0,9492 menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model mampu menjelaskan variabel terikat hingga 94,92 persen sedangkan 5,08 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model

Kata Kunci : Faktor Pajak, Inflasi, *Ordinary Least Squares (OLS)*, Penerimaan PPh, Tingkat Kepatuhan, Pertumbuhan Ekonomi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas kasih sayang dan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Terima kasih kepada Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis , dan tidak lupa Akhmad Syakir Kurnia, S.E.,Msi.,Ph.D. selaku ketua jurusan IESP yang telah memberikan penulis ruang tuntut berproses dan belajar selama beberapa tahun terakhir.

Kepada Dr. Hadi Sasana S.E.,M.Si. selaku dosen wali dari penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis, dan Dr. Dwisetia Poerwono,M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi dari penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, masukan, dan arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada Yusuf Yanuar, SE.Ak., yang telah memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan dan sepermainan, Muhammad Iqbal Adi Pratama, Faiq Fuadi, Ghana Atma Sulistya, Dwi Gama Primadasa, Dian Laila Sari, dan tidak lupa teman-teman “likoc group” , teman-teman kos WismaGenius, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

Terakhir, Penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan tak terbatas kepada Bapak Azhari Sabri, serta Ibu Armalia, atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan selama ini. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa. Kepada adik tersayang, Andriyoza Ardiansyah. Terima kasih atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Pajak.....	17
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	17
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	19
2.1.1.3. Jenis Pajak.....	21
2.1.1.4. Sistem pemungutan pajak.....	24
2.1.1.5. Surat Setoran Pajak (SSP).....	26
2.1.1.6. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	27
2.1.1.7. Ekstensifikasi Pajak.....	34
2.1.2. Inflasi.....	36
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
2.2. Penelitian Terdahulu.....	42
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	50
2.4. Hipotesis.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
4.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	54
4.1.1. Variabel Penelitian.....	54
4.1.2. Definisi Operasional Variabel.....	54
4.1.2.1. Penerimaan PPhOP.....	54
4.1.2.2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	55
4.1.2.3. Surat Setoran Pajak (SSP).....	55
4.1.2.4. Inflasi.....	56
4.1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi.....	56

4.2. Jenis dan Sumber Data	57
4.2.1. Jenis Data.....	57
4.2.2. Sumber Data	57
4.3. Metode Analisis.....	58
4.3.1. Perhitungan Perkembangan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	58
4.3.2. Analisis Regresi.....	59
4.3.3. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	60
4.3.4. Deteksi Normalitas	60
4.3.5. Deteksi Autokorelasi	61
4.3.6. Deteksi Multikolinearitas	62
4.3.7. Deteksi Heteroskedastisitas	62
4.3.9. Uji Signifikansi individu (Uji t)	63
4.3.10. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	65
4.3.11. Koefisien Determinasi (R^2)	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.1.1. Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.....	68
4.1.2. Kondisi Perekonomian Pada Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari.....	69
4.2. Analisis Data	74
4.2.1. Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik.....	74
4.2.2. Pengujian Statistik.....	77
4.2.2.1. Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.2.2.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	77
4.2.2.3. Uji Signifikansi Individual (Uji t)	78
4.2.3. Interpretasi Hasil Analisis	82
4.2.3.1. Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPhOP Pasal 25/29... ..	84
4.2.3.2. Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh OP Pasal 25/29	86
4.2.3.3. Analisis Pengaruh Jumlah Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan PPh OP Pasal 25/29.....	88
4.2.3.4. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPh OP Pasal 25/29	90
BAB V PENUTUP.....	92
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Tax Ratio</i> Indonesia 2011-2015	6
Gambar 2.1 Skema Pengelompokan Pajak	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	52
Gambar 4.1 Pertumbuhan Penerimaan PPhOP	81
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Penerimaan PPhOP 25/29 dan Inflasi 2011-2015	85
Gambar 4.3 Pertumbuhan Penerimaan PPhOP 25/29 dan Jumlah WPOP.....	87
Gambar 4.4 Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan Jumlah SSP	89
Gambar 4.5 Pertumbuhan Penerimaan PPhOP dan PDRB.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber-Sumber Pendapatan Negara 2016	2
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah).....	5
Tabel 1.3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh tahun 2012-2014	7
Tabel 1.4 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I (Juta Rupiah)	9
Tabel 1.5 Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang	10
Tabel 1.6 Kondisi Perekonomian Kota Semarang	11
Tabel 2.1 Tarif PPh Orang Pribadi.....	34
Tabel 2.2 Tarif PPh Badan	34
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1 Tingkat Penerimaan PPhOP Wilayah Penelitian 2011-2015	69-70
Tabel 4.2 Kondisi Perekonomian Kota Semarang	71
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Penerimaan PPhOP25/29 , Inflasi dan Variabel Pajak	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Jarque-Bera.....	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Korelasi antar Variabel Bebas	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 4.8 Tarif PPh Pasal 25/29 WPOP.....	79
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Model Output Regresi.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Data Runtun Waktu Variabel Penelitian	100
LAMPIRAN B. UJI PENYIMPANGAN ASUMSI KLASIK.....	102
B.1 UJI NORMALITAS	102
B.2 UJI MULTIKOLINERITAS	102
B.3 UJI AUTOKORELASI	102
B.4 UJI HETEROSKEDASTISITAS	103
LAMPIRAN C Hasil Estimasi Eviews 8.0	103
C.1. Hasil Estimasi Regresi	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai penyelenggara dan penetap kebijakan memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang besar. Dana untuk pelaksanaan dan pembangunan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Setiap tahunnya tingkat APBN di Indonesia semakin meningkat sehingga membutuhkan penerimaan yang sangat besar, maka diharapkan penerimaan dalam negeri juga meningkat untuk membiayai belanja negara yang semakin meningkat. Salah satu penerimaan dalam negeri yang paling besar adalah pajak.

Pajak dalam pengertian ekonomi merupakan pengalihan sumber ekonomis dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pemungutan pajak berdasarkan kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN dan PPNBM), Bea Materai, Cukai, Bea Perolahn Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, yang termasuk dalam pajak daerah menurut UU NO 28 Tahun 2009 adalah : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan kendaraan di atas air dan lain-lain, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet , Bea Perolehan Hak Atas Tana dan Bangunan.

Tabel 1.1

Sumber-Sumber Pendapatan Negara 2016

POSTUR APBN 2016

Uraian	(Angka dalam Triliun Rupiah)
A. Pendapatan Negara	1.822,5
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8
II. Penerimaan Hibah	2,0

Sumber : Kementerian Keuangan Indonesia, 2016.

Menurut APBN tahun 2016, Penerimaan pajak adalah sumber utama dari pembiayaan negara dibanding sektor lainnya, penerimaan pajak merupakan sumber

yang paling besar untuk membiayai belanja rutin maupun pembangunan. Secara umum pajak memiliki beberapa fungsi :

1. Fungsi penerimaan (budgetair) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
2. Fungsi mengatur (regulator) : memiliki maksud pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan senjata api.
3. Fungsi Stabilitas (stabilitator) : artinya dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Kebijakan Fiskal)
4. Fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran kepentingan umum.

Pajak memiliki peran yang besar dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari presentase penerimaan negara dalam APBN dari tahun ke tahun , sejak tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya terdapat perubahan system pemungutan pajak dari yang semula berbentuk *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*, berdasarkan data dari komposisi penerimaan dalam negeri sebelum dan

sesudah dilakukannya reformasi pajak maka terdapat perbedaan yang cukup besar tahun 1980an sektor perpajakan menyumbang 36,9% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2000an perpajakan menyumbang 68,2%. (Harris dkk, 2016). *Self assessment system* adalah suatu jenis sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang dan seharusnya dibayar.

Pajak juga dapat menjadi instrument kebijakan fiskal yang efektif dalam mengarahkan kebijakan perekonomian. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (2015), realisasi penerimaan pajak tahun 2014 yang dikelola Ditjen Pajak (PPh Non Migas) hingga 31 Desember 2014 mencapai Rp. 458.7 Triliun. Sementara itu, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 adalah Rp. 486.0 Triliun, berarti masih terjadi *shortfall* Rp 27.3 Trilliun. Total target penerimaan perpajakan pada APBN 2014 mencapai Rp 1,246.1 atau sekitar 76 persen dari Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 64.9 persen dari volume penerimaan APBN 2014.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah)

Tahun	P.PPh Non migas	PPhOP	PPhBadan	PPh 26	PPh FdF	PPh dP	PPh NML
2011	358,02	70,03	154,60	27,23	50,81	3,33	0,04
2012	381,60	83,36	152,13	24,61	60,38	3,66	0,03
2013	417,70	94,54	154,29	27,98	71,57	3,89	0,04
2014	458,73	110,35	148,36	34,70	87,32	5.65	0.08

Sumber : LKPP 2011-2014 (*audited*) Kemenkeu, hal 36.

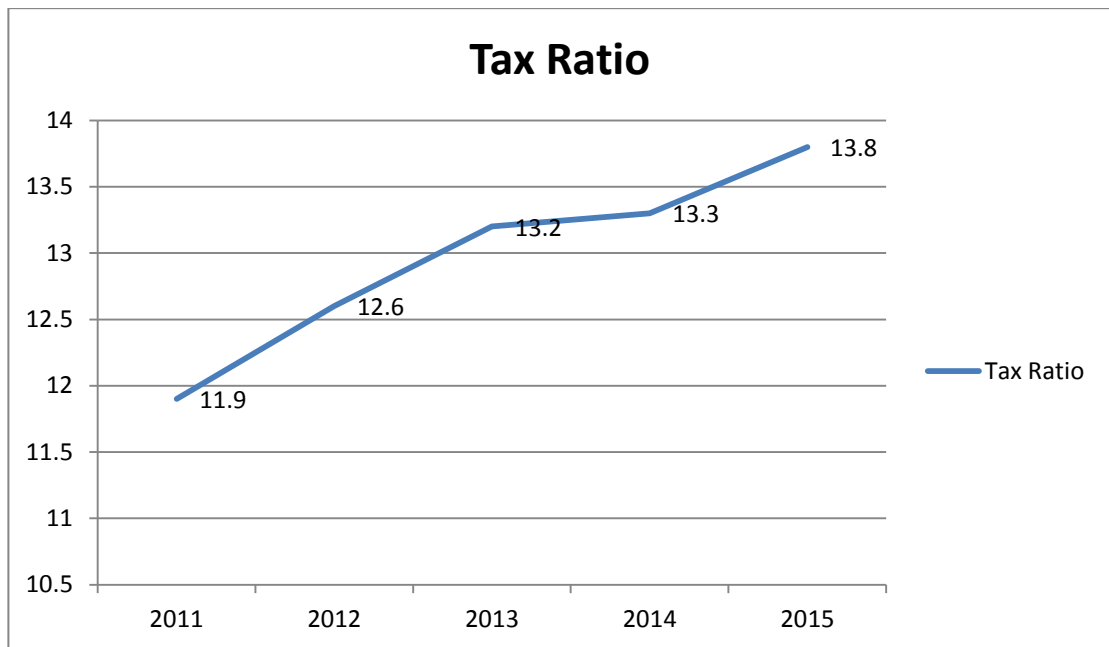
Keterangan : P.PPh Non Migas = Penerimaan Pajak Non Migas, PPhOP = Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21/25/29, PPh Badan = Pajak Penghasilan Pasal 25/29 , Pajak Penghasilan Pasal 26, PPh FdF = Pajak penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri, PPh dP = Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah PPh NML = Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya,

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1.2 . Diperoleh informasi bahwa Penerimaan perpajakan terbesar pada tahun 2014 didapat dari Pajak Penghasilan yaitu sebesar 546.2 milyar rupiah Penyumbang terbesar kedua dengan jumlah kontribusi 409.2 milyar rupiah PPN&PPNBM. Kinerja yang ditunjukkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak secara umum sangat baik berdasarkan tabel APBN, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan *tax ratio* Indonesia yang masih rendah

dari potensi yang dapat dicapai di Indonesia, saat ini Indonesia berada diperingkat 3 terbawah dari negara-negara di ASEAN.

Gambar 1.1

***Tax Ratio* Indonesia 2011-2015**



Sumber : Kementerian Keuangan,2016 (Diolah)

Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemungutan pajak masih kecil dari seharusnya, Prasetyo (2014) *Tax ratio* Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, negara anggota G-20, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika. Satu-satunya cara untuk meningkatkan *tax ratio* adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.141.797	1.166.036
Wajib Pajak OP	16.632.890	16.589.939	17.191.797
SPT Tahunan PPh	9.482.480	10.781.103	10.807.624
Wajib Pajak Badan	547.659	592.373	548.676
Wajib Pajak OP	8.934.821	10.188.730	10.258.948
Rasio Kepatuhan	53.70%	60.80%	58.87%
Wajib Pajak Badan	53.36%	51.88%	47.05%
Wajib Pajak OP	53.72%	61.72%	59.67%

Sumber : Laporan Tahunan DJP tahun 2014

Tabel 1.3 menunjukkan masih rendahnya rasio kepatuhan WP terhadap peraturan pembayaran pajak. 3 tahun terakhir menunjukkan lebih dari 40% WP yang telah terdaftar secara administrasi memiliki kewaiban untuk membayar SPT tidak melaporkan SPT yang seharusnya. Pemerintah tidak serta merta diam mengetahui masih rendahnya tingkat kepatuhan serta pendapatan perpajakan Indonesia. Semenjak surat edaran Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 telah ditetapkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan pajak nasional. Kegiatan ekstensifikasi pajak menurut surat edaran DJP NOMOR SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang berkaitan dengan perluasan objek-objek pajak (menambah *tax base*) dan penambahan Wajib pajak pada DJP, Program ekstensifikasi pajak ini sangat berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow yang secara umum

menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk sebagai dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. Pemberian himbauan, bimbingan, konsultasi, pengawasan terhadap WP, Penagihan pajak merupakan contoh-contoh pelaksanaan intensifikasi pajak.

Selain ekstensifikasi dan intensifikasi, terdapat beberapa faktor di luar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Faktor eksternal tersebut dapat berupa faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, harga minyak internasional, produksi mentah minyak internasional, dan tingkat suku bunga (Nicola dkk, 2016). Pada faktor eksternal yang telah disebut, terdapat inflasi yang nilainya berfluktuasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu (Dion, 2011), Keynes (dikutip oleh Putong, 2004) juga menjelaskan bahwa inflasi terjadi dikarenakan masyarakat ingin

hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Sehingga inflasi juga dapat menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I (Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013
Penerimaan PPh Orang Pribadi	248.561,00	198.687,19	309.361,58
Penerimaan PPh Badan	919.287,00	1.159.797,64	1.542.998,67
Rasio Kepatuhan	58%	60%	63%

Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I

Pada Tabel 1.4 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak pada kanwil DJP Jawa Tengah I dari tahun 2011 – 2013, namun rasio kepatuhan yang tercatat masih cukup rendah. Tidak jauh berbeda dari tingkat rasio Indonesia, tingkat kepatuhan pada Provinsi Jawa Tengah juga masih tergolong rendah, Berdasarkan data DJP Kanwil Jateng I, Jumlah WP yang tercatat pada tahun 2013 adalah sebanyak 986.881 dari 1,7 juta masyarakat yang masuk kategori Wajib Pajak. 986.881 WP terbagi menjadi 831.723 WP Orang Pribadi (OP) karyawan/pegawai , 115.249 non karyawan/usaha bebas, dan WP Badan Usaha/Badan Hukum 39.909. dari data tersebut sebanyak 394.752 WP yang telah terdaftar tidak menyampaikan kewajibannya untuk membayar pajak , jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, hanya 12% dari total wajib pajak potensial. Fuad (Dikutip oleh

Briliantono, 2014) mengatakan apabila 100% Wajib Pajak potensial di Jawa Tengah membayar pajak, dana bagi hasil bisa mencapai Rp 3,6 Triliun, dan apabila mendapat 50% dari yang belum membayar pajak, dana bagi hasil pajak yang diterima daerah bisa mencapai Rp 2 triliun.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang terus berkembang sebagai pusat perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2014-2015, pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target yang di harapkan, *shortfall* yang dialami secara terus-menerus ini menunjukkan perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Tabel 1.5
Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang
Tahun 2014 - 2015

	2014				2015			
	Target	Realisasi	(<i>Shortfall</i>)	Rasio	Target	Realisasi	(<i>Shortfall</i>)	Rasio
Semarang Barat	56.974	40.478	(16.496)	71,05%	55.314	44.406	(10.908)	70,06%
Semarang Timur	25.944	20.089	(5.855)	77,43%	22.657	20.569	(2.088)	76,56%
Semarang Selatan	12.252	9.255	(2.997)	75,54%	11.222	10.916	(306)	72,48%
Semarang Tengah I	5.922	5.107	(815)	86,24%	5.504	5.370	(134)	87,14%
Semarang Tengah II	5.827	5.057	(770)	86,79%	5.378	5.405	27	82,67%
Semarang Candisari	71.835	52.538	(19.297)	73,14%	66.518	54.596	(11.922)	72,43%
Semarang Gayamsari	46.586	33.299	(13.287)	71,48%	40.929	36.589	(4.340)	70,57%

Sumber : DJP, Mei 2016, diolah.

Pada tabel 1.5 , Rasio Penerimaan Candisari mengalami *shortfall* yang paling tinggi dibandingkan dengan KPP lain yang berlokasi di Kota Semarang pada tahun 2014 mencapai 19.000 WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, tidak melaporkan pendapatannya. Hal ini berimplikasi secara langsung terhadap pendapatan pajak penghasilan yang tidak mencapai target.

Tabel 1.6
Kondisi Perekonomian Kota Semarang

TAHUN	Inflasi	PDRB (Ribu Rupiah)	Jumlah WP OP pasal 25/29 Usahawan Efektif (Candisari)
2011	2,87	22.736.136.190	4.108
2012	4,85	24.196.487.770	4.519
2013	8,19	25.697.338.390	4.999
2014*	8,53*	28.774.265.765*	5.373

Sumber : BPS, 2016, *Angka Sementara

Pada tabel 1.6, Pertumbuhan PDRB pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang konsisten, peningkatan WPOP Usahawan juga terjadi, namun jika dibandingkan dengan tabel 1.5 rasio tingkat kepatuhan WP pada KPP Candisari masih cenderung rendah , dan masih juga banyak usahawan yang belum mendaftarkan usahanya/tidak melaporkan pendapatan usahanya . sehingga tingkat penerimaan pajak seharusnya masih bisa meningkat.

Pertumbuhan Inflasi di Kota Semarang meningkat tajam pada tahun 2012-2015, walaupun masih diikuti dengan pertumbuhan PDRB jika tidak terkontrol, Inflasi dapat menyebabkan kelesuan ekonomi. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di Kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki kontribusi yang besar pada sistem penerimaan negara di Indonesia. Pada 5 tahun terakhir rata-rata Penerimaan PPhOP dalam Penerimaan PPh-NonMigas mencapai 89,57 milyar (22,02%). Penerimaan PPhOP tersebut tergolong kecil mengingat jumlah wajib pajak yang telah terdaftar mencapai 17,2 juta , masih kecilnya penerimaan tersebut disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan dari masyarakat yang telah terdaftar maupun masyarakat yang sudah tergolong wajib pajak namun tidak melaporkan pendapatannya.

Pada Provinsi Jawa Tengah hanya sebanyak 204.000 jiwa terdaftar dari 1.700.000 masyarakat yang masuk dalam kategori membayar pajak (Briliantono, 2014) .

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dan juga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah mengalami hal serupa khususnya pada KPP Pratama Candisari Semarang jumlah WPOP pasal 25/29 terdaftar sebanyak 5.373 WPOP pada tahun 2014. Tingkat kepatuhan juga tergolong masih rendah pada tahun 2014-2015 KPP Pratama Candisari Semarang menempati peringkat 3 terbawah dari KPP

yang terdapat di Kota Semarang. , sehingga dibutuhkan perencanaan, serta strategi agar pendapatan pajak penghasilan orang pribadi Pasal 25/29 meningkat.

Selain faktor-faktor internal yang merupakan variabel pajak seperti Jumlah Wajib pajak, dan Jumlah SSP yang disetorkan, terdapat pula faktor eksternal seperti tingkat inflasi yang merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus menerus (kontinu) menyebabkan kemampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya menurun, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan jumlah pajak penghasilan orang pribadi Pasal 25/29 yang disetorkan, dan tidak lupa juga mempertimbangkan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini akan diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 guna meningkatkan pendapatan pajak penghasilan pada KPP PRATAMA CANDISARI. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas dapat disusun pertanyaan penelitian berupa :

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan PPhOP Pasal 25/29 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi terhadap peningkatan jumlah penerimaan PPhOP Pasal 25/29 ?
3. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan PPhOP Pasal 25/29?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan PPhOP Pasal 25/29 ?
5. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29 secara simultan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Candisari Semarang. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi perkembangan penerimaan PPhOP pasal 25/29 di KPP Pratama Candisari Semarang.
- b. Mengidentifikasi pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah SSP yang dilaporkan terhadap pendapatan PPhOP pasal 25/29 .
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi WPOP untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk membayar pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan berupa laporan penelitian.

Bab 2 merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori dimulai dengan pemaparan pengertian, serta fungsi pajak serta hal-hal yang terkait dengan pajak penghasilan. Selain itu juga dijelaskan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Pada bab ini juga disisipkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta hipotesis penelitian

Bab 3 merupakan bagian metode penelitian. Pada bab ini dibangun model analisis *Ordinary Least Squares*, yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan variabel-variabel penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data

Bab 4 merupakan bagian hasil dan pembahasan. Pada bab ini dianalisis perkembangan penerimaan pajak orang pribadi, serta variabel pajak lainnya sejak tahun 2011 hingga 2015. Pada bab ini juga dicantumkan

hasil estimasi pada model yang telah dibangun dan analisis hasil estimasi tersebut.

Bab 5 merupakan penutup. Bab ini terdiri dari Simpulan hasil penelitian, dan saran. Pada bab ini juga disampaikan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis